



Judul : RUU Perlindungan Data Pribadi Terancam Didrop
Tanggal : Sabtu, 16 April 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

RUU Perlindungan Data Pribadi Terancam Didrop

Pihak pemerintah diajak melakukan komunikasi informal selama masa reses DPR untuk mempercepat diperolehnya titik temu masalah RUU PDP.

PUTRA ANANDA
ananda@mediaindonesia.com

WAKTU pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dilakukan antara Komisi I DPR dan pemerintah terancam habis apabila tidak bisa dituntaskan dalam masa sidang berikutnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menjelaskan pembahasan RUU PDP perlu segera kembali dilakukan setelah masa reses DPR berakhir pada Mei mendatang.

"Bisa jadi itu kesempatan terakhir karena di belakangnya (RUU PDP) sudah *ngantre* (RUU lain), seperti revisi UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang merupakan inisiatif pemerintah," ungkap Farhan saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Farhan menjelaskan pimpinan DPR dan pemerintah melalui rapat koordinasi yang dilakukan antara Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) sepakat bahwa pembahasan RUU ITE baru bisa dilakukan setelah pembahasan RUU PDP tuntas. Oleh karena itu,

komisi berkomitmen bersama pemerintah dengan segera menyelesaikan RUU PDP pada masa sidang mendatang. DPR akan kembali bersidang pada 17 Mei mendatang.

"Kalau PDP tidak selesai, maka didrop, ITE masuk duluan," ujar Farhan.

Menyadari waktu pembahasan RUU PDP yang semakin sempit, Farhan berharap pihak pemerintah melakukan komunikasi informal selama masa reses untuk mempercepat diperolehnya titik temu masalah RUU PDP.

Poin utama yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR ialah mengenai posisi otoritas perlindungan data pribadi. DPR menginginkan lembaga tersebut bersifat independen, sedangkan pemerintah berkekuatan fungsi otoritas tersebut bisa dijalankan oleh kementerian secara teknis.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pun telah menyatakan pemerintah menantikan undangan Komisi I DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU PDP. Namun, hingga DPR menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022, Kamis (14/4), rapat lanjutan pembahasan RUU PDP belum terlaksana.

Kerja DPR

Dalam rapat paripurna,

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal keberhasilan menelurkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). "UU TPKS yang baru saja disahkan harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual."

Ia menambahkan pada masa persidangan IV, DPR tengah melakukan pembahasan tujuh RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Salah satu RUU tersebut ialah RUU PDP.

Selanjutnya, DPR telah mengambil keputusan atas tiga RUU provinsi baru di Papua sebagai usulan inisiatif DPR. Adapun pengesahan pengajuan revisi UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dilakukan pada masa sidang berikutnya.

"Kita akan rapim (rapat pimpinan) dan bamuskan pada masa sidang depan," kata pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).

Revisi UU PPP telah mendapatkan persetujuan dalam rapat pleno Badan Legislatif (Baleg). Hasil pembahasan tingkat I revisi UU PPP tersebut disetujui seluruh fraksi, kecuali Fraksi PKS. (P-2)